

Vol. 1 – Edisi 2

PDRD LENS

Navigasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Dinamika Perekonomian

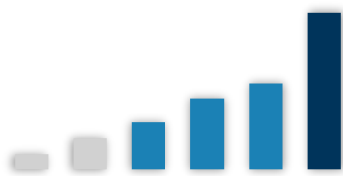


FEBRUARI

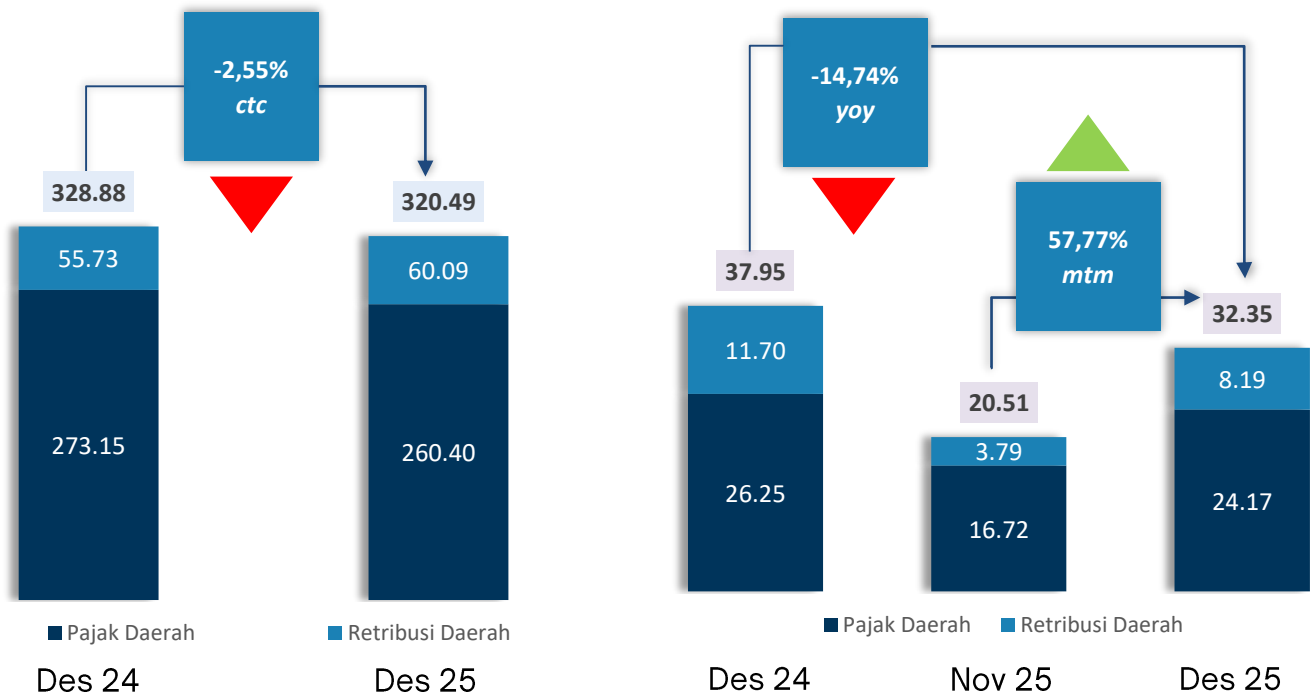
2026



PERFORMANCE HIGHLIGHTS



Realisasi PDRD Desember 2024 – 2025 (Triliun Rupiah)



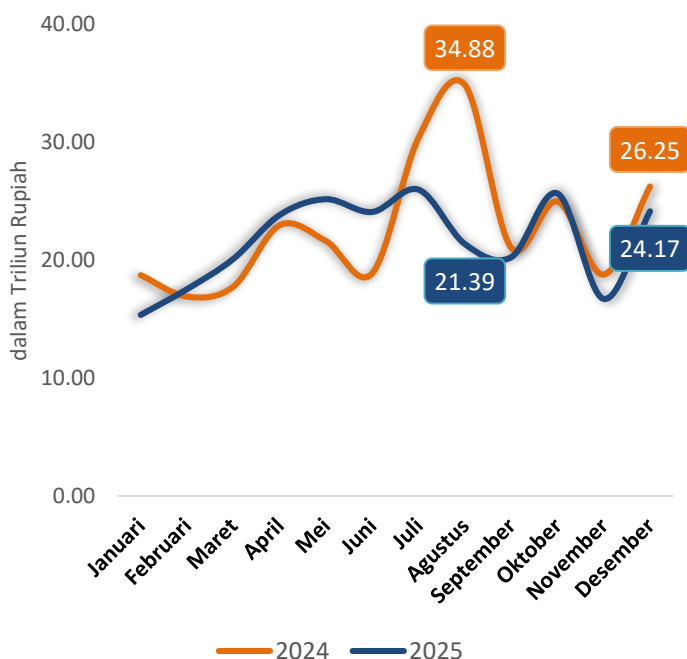
Sumber: SIKD, data per 18 Februari 2026

Kinerja penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pada bulan Desember 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan penerimaan bulan sebelumnya. Momen libur sekolah serta perayaan Natal dan Tahun Baru telah mendorong peningkatan mobilitas masyarakat, turut mengakselerasi aktivitas ekonomi yang berdampak pada penerimaan PDRD. Pada bulan Desember 2025, penerimaan PDRD berhasil tumbuh 57,77% dibandingkan bulan sebelumnya (*mtm*), dengan kontribusi pajak daerah sebesar 44,54% dan retribusi daerah sebesar 116,12% dimana kenaikan signifikan retribusi daerah disebabkan oleh *cyclical factor* atau *low base effect* di bulan sebelumnya. Pertumbuhan di bulan Desember 2025 ini memberikan sinyal yang positif untuk memacu penerimaan periode selanjutnya, meskipun penerimaan tahun lalu (*yoy*) dan penerimaan kumulatif (*ctc*) masih terkontraksi dibandingkan pencapaian tahun lalu di periode yang sama.

MONTHLY PATTERN



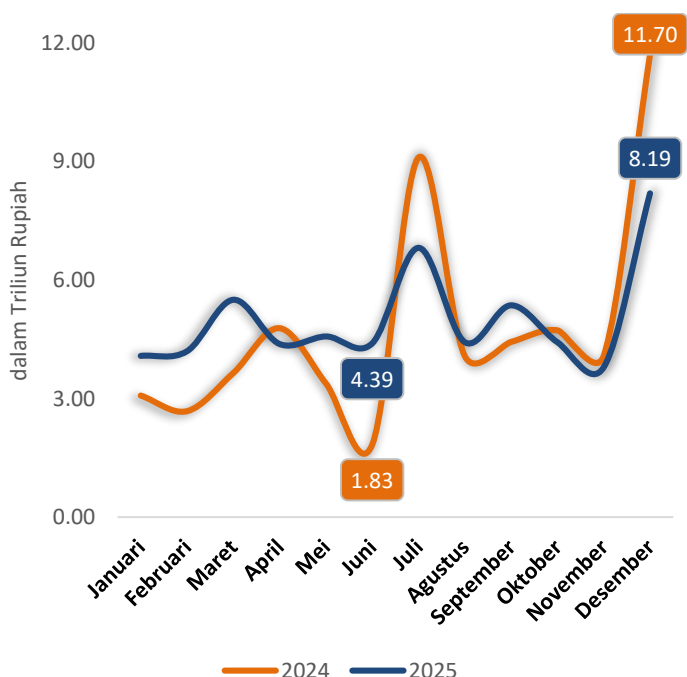
Pola Realisasi Pajak Daerah Bulanan



Sumber: SIKD, data per 18 Februari 2026

Pola bulanan realisasi pajak daerah pada tahun 2025 menunjukkan perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2024, terutama pada komponen pajak daerah. Penerimaan pajak daerah bulanan tahun 2025 terlihat memiliki distribusi yang cenderung merata. Bulan Agustus biasanya menjadi salah satu periode puncak bagi penerimaan pajak daerah, tetapi justru mengalami kontraksi yang cukup dalam pada tahun 2025. Meskipun kondisi ini membuat total penerimaan pajak daerah hingga akhir Desember 2025 belum dapat melampaui pencapaian tahun sebelumnya, setidaknya hal ini menunjukkan masih adanya peluang untuk meningkatkan penerimaan ke depannya.

Pola Realisasi Retribusi Daerah Bulanan



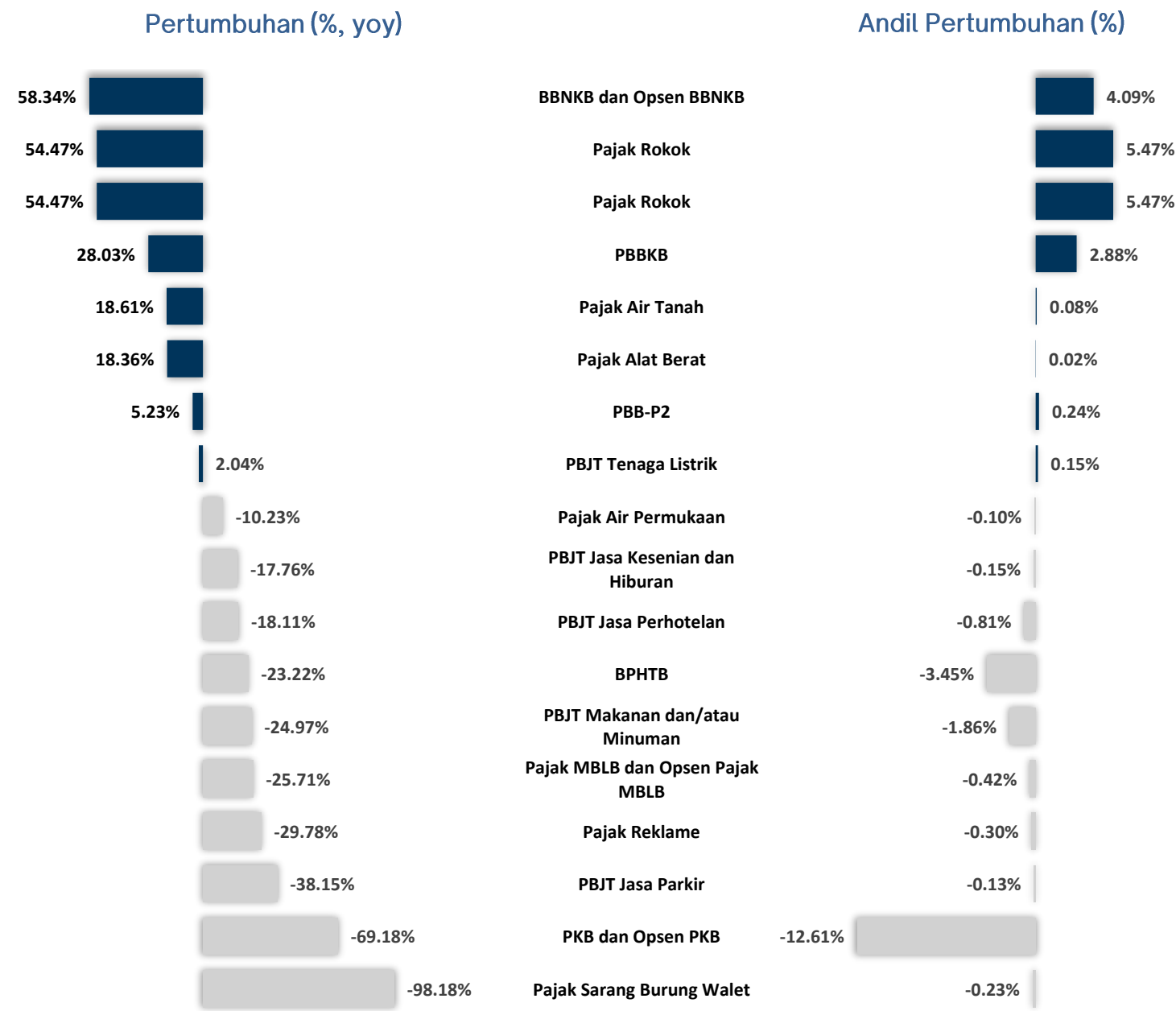
Sumber: SIKD, data per 18 Februari 2026

Sementara itu, pola penerimaan retribusi daerah tahun 2025 terlihat identik dengan pola di tahun 2024. Intensitas penerimaan tertinggi terjadi pada bulan Juli dan Desember. Secara umum terlihat juga penerimaan tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun dalam tiga bulan terakhir realisasi bulanan pada tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun 2024. Peningkatan penerimaan retribusi ini dapat menjadi indikasi adanya peningkatan akses terhadap layanan publik di daerah, baik pada sektor jasa umum, dukungan fasilitas usaha, maupun kemudahan dalam proses perizinan.



Pada periode Desember 2025, terdapat tujuh jenis pajak yang mengalami pertumbuhan positif, yakni BBNKB dan Opsen BBNKB, Pajak Rokok, PBBKB, PAT, PAB, PBB P2, dan PBJT Tenaga Listrik. Sementara itu jenis pajak lainnya berkontraksi secara yoy. PKB dan Opsen PKB, BPHTB, serta PBJT Makanan Minuman memberikan efek pertumbuhan negatif yang cukup signifikan atas penerimaan pajak bulan Desember. Namun efek tersebut sedikit terkoreksi dengan kinerja positif dari Pajak Rokok, BBNKB dan Opsen BBNKB, serta PBBKB yang tumbuh cukup signifikan di bulan Desember.

Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan Pajak Daerah (yoy)



Sumber: SIKD, data per 18 Februari 2026

REVENUE DETAIL



Realisasi dan Pertumbuhan Pajak Daerah Hingga Desember 2025 (c to c)

dalam Triliun Rupiah

Jenis Pajak ¹⁾	2024	2025	Growth (%)	Andil Pertumbuhan (%)
PBB-P2	28.34	29.68	4.71 ▲	0.49 ▲
PBBKB	34.47	35.71	3.62 ▲	0.46 ▲
PBJT Makanan dan/atau Minuman	17.98	18.47	2.70 ▲	0.18 ▲
Pajak Alat Berat	0.31	0.52	67.38 ▲	0.08 ▲
Pajak Rokok	20.00	20.18	0.92 ▲	0.07 ▲
Pajak Reklame	2.58	2.75	6.78 ▲	0.06 ▲
PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	2.42	2.53	4.93 ▲	0.04 ▲
Pajak Air Tanah	1.08	1.10	1.64 ▲	0.01 ▲
Pajak Air Permukaan	1.24	1.23	-0.97 ▼	-0.004 ▼
PBJT Jasa Parkir	0.91	0.88	-3.99 ▼	-0.01 ▼
Pajak MBLB dan Opsen MBLB	2.66	2.60	-2.51 ▼	-0.02 ▼
Pajak Sarang Burung Walet	0.08	0.01	-89.61 ▼	-0.03 ▼
PBJT Tenaga Listrik	21.05	20.84	-1.00 ▼	-0.08 ▼
PBJT Jasa Perhotelan	11.70	11.00	-5.96 ▼	-0.26 ▼
BPHTB	29.50	27.25	-7.61 ▼	-0.82 ▼
PKB dan Opsen PKB	59.76	55.37	-7.35 ▼	-1.61 ▼
BBNKB dan Opsen BBNKB	39.06	30.27	-22.50 ▼	-3.22 ▼

Sumber: SIKD, data per 18 Februari 2026

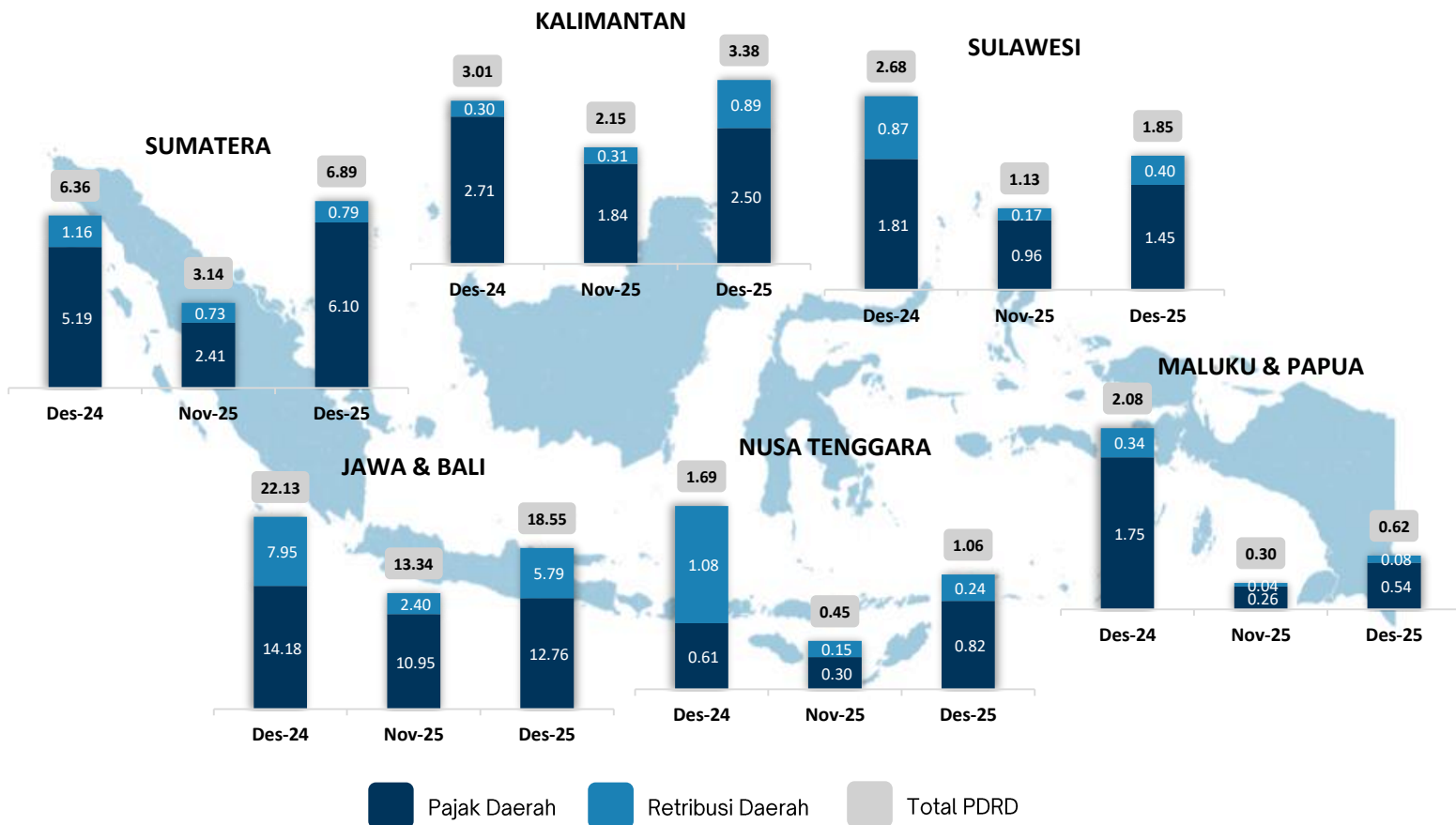
Pertumbuhan negatif pajak daerah pada bulan Desember 2025 turut memberikan andil terhadap kontraksi penerimaan akumulatif pajak daerah sepanjang 2025 yang mencapai 4,67%. Terdapat sembilan jenis pajak yang berkontraksi dengan akumulasi mencapai lebih dari 6% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut sedikit teredam dengan meningkatnya delapan jenis pajak daerah lainnya yang tumbuh hingga 1,38% sepanjang tahun 2025. Hingga Desember 2025, PBB-P2 dan PBBKB memberikan andil positif tertinggi terhadap pertumbuhan pajak daerah, sedangkan PKB dan BBNKB beserta opsennya memberikan andil negatif terbesar terhadap pertumbuhan pajak daerah. Penurunan penerimaan BBNKB beserta opsennya memberikan dampak signifikan terhadap kontraksi pajak daerah hingga 4,03%. Hal tersebut terjadi akibat menurunnya volume penjualan mobil baru serta konsekuensi jangka pendek dari kebijakan penghapusan BBNKB untuk kendaraan tangan kedua. Sebaliknya, terdapat jenis pajak yang pertumbuhannya signifikan yaitu PAB. Hal ini ditengarai karena semakin intensifnya upaya pemungutan PAB.

¹⁾ PBJT: Pajak Barang Jasa Tertentu, PBB P2: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, PBBKB: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, MBLB: Mineral Bukan Logam dan Batuan, PKB: Pajak Kendaraan Bermotor, BPHTB: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, BBNKB: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, PAB: Pajak Alat Berat

SPATIAL ANALYSIS



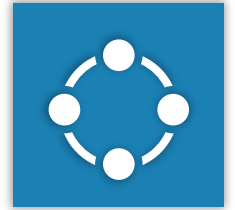
Pertumbuhan PDRD Spasial (yoy dan mtm)



Sumber: SIKD, data per 18 Februari 2026

Mengikuti tren penerimaan bulanan nasional, seluruh wilayah mengalami pertumbuhan penerimaan PDRD pada Desember 2025 secara mtm. Baik pajak daerah maupun retribusi daerah secara bersama-sama tumbuh positif jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Namun, jika dibandingkan dengan Desember tahun sebelumnya (yoy), hanya wilayah Sumatera dan Kalimantan yang mencatatkan kinerja positif. Pertumbuhan wilayah Sumatera ditopang oleh pajak daerah, sementara pertumbuhan di wilayah Kalimantan dipicu oleh kenaikan retribusi daerah. Wilayah Maluku dan Papua mengalami pertumbuhan negatif yang paling dalam jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh penerimaan PDRD yang mengalami penurunan sebesar 70,33%.

RELATED INDICATORS



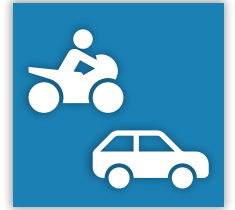
Kontraksi penerimaan PDRD yang terjadi hingga Desember 2025 perlu dicermati secara menyeluruh apakah disebabkan oleh penurunan basis pajak daerah atau merupakan dampak dari transisi implementasi kebijakan dan tata kelola administrasi. Oleh karena itu, perlu dilihat perkembangan indikator aktivitas ekonomi yang representatif terhadap basis PDRD. Perkembangan beberapa indikator kunci baik makro maupun mikro menjadi sinyal awal melemah atau menguatnya basis PDRD.

Perkembangan aktivitas ekonomi secara makro tercermin salah satunya melalui aktivitas sektor industri manufaktur. Walaupun sektor ini bukan merupakan basis utama pajak daerah, keterkaitannya yang erat dengan sektor lain menyebabkan pertumbuhan industri dapat memacu pertumbuhan kinerja sektor-sektor yang menjadi basis penerimaan PDRD. Pada bulan Desember 2025, terpantau Prompt Manufacturing Index (PMI) sebesar 51,2, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya meskipun tetap berada pada zona ekspansi.

Peningkatan konsumsi masyarakat terindikasi dari penjualan barang ritel yang termuat dalam Retail Sales Index (RSI), meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. RSI meningkat sebesar 4,39% secara yoy dan 4,0% secara mtm. Peningkatan mtm tersebut ditopang oleh peningkatan keseluruhan komoditas ritel. Walaupun cakupan komoditas RSI tidak sepenuhnya beririsan dengan basis PDRD, tren positif ini mengindikasikan adanya peningkatan daya beli masyarakat.

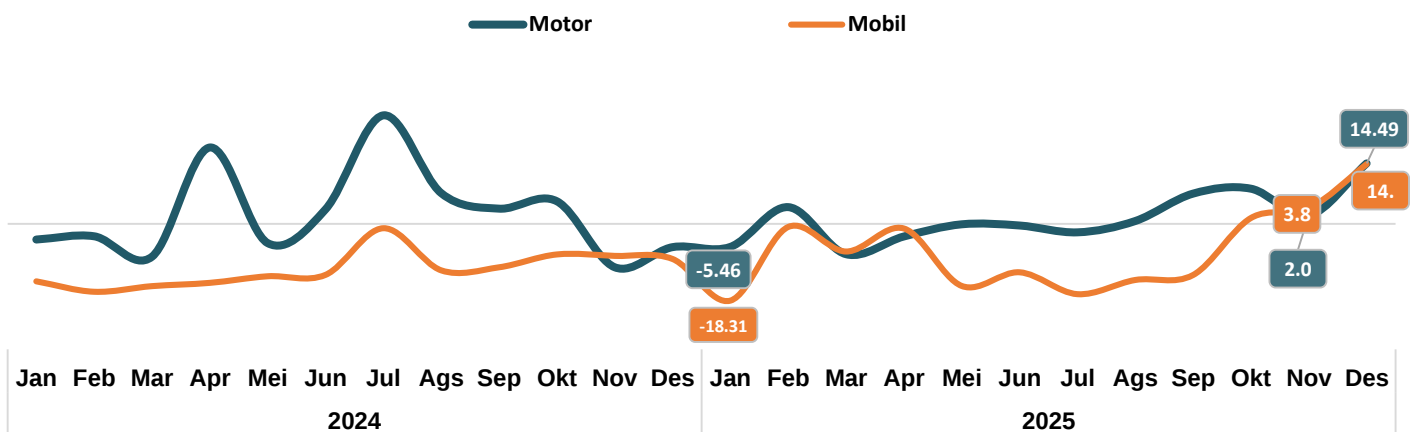


VEHICLES SALES



Terdapat peningkatan tajam atas penjualan kendaraan bermotor pada Desember 2025 sebesar 14,5% yoy. Kinerja penjualan kendaraan bermotor pada periode tersebut mencatatkan realisasi yang positif dengan total mencapai 555,7 ribu unit. Capaian tersebut ditopang oleh penjualan kendaraan roda dua sebanyak 461,9 ribu unit, serta kendaraan roda empat sebanyak 93,8 ribu unit. Hal ini menunjukkan keberlanjutan tren positif penjualan kendaraan roda dua dalam lima bulan terakhir dan kendaraan roda empat dalam tiga bulan terakhir.

Pertumbuhan Penjualan Kendaraan Bermotor (% yoy)



Sumber: Gaikindo dan AISI

Hingga akhir tahun 2025, kendaraan bermotor terjual sebesar 7,25 juta unit, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang terjual sebanyak 7,22 juta unit. Pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor semestinya berpotensi memperluas basis BBNKB dan PKB. Namun, realisasi penerimaan kedua jenis pajak tersebut pada Desember 2025 justru tetap mengalami kontraksi secara yoy. Dari sisi basis pajak, pertumbuhan kendaraan jenis sepeda motor belum mampu mengimbangi kontraksi penjualan kendaraan jenis mobil. Perlu dicermati pula bahwa realisasi penjualan tersebut mencakup penjualan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Mengingat jenis kendaraan ini merupakan pengecualian dari objek PKB dan BBNKB, kondisi ini menimbulkan dinamika penyesuaian terhadap struktur basis penerimaan pajak daerah.

Lebih lanjut, penurunan penerimaan pajak juga erat kaitannya dengan arah kebijakan dan administrasi perpajakan daerah. Peningkatan penjualan kendaraan hingga bulan Desember ternyata belum mampu mengompensasi kontraksi penerimaan yang timbul akibat dampak jangka pendek dari kebijakan penghapusan BBNKB untuk kendaraan tangan kedua yang mulai berlaku pada tahun 2025. Sebagaimana diketahui, kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran PKB dalam jangka panjang.

VEHICLES TAX COMPLIANCE



Kepatuhan Pembayaran Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor

Kategori	2024	2025	Growth
Lunas	66.151.003	68.010.176	2,8%
Tahun lalu	7.804.943	10.700.829	37,1%
Kendaraan Tahun Berjalan + Baru	58.346.060	57.309.347	-1,8%
Belum Lunas	49.209.283	49.597.559	0,8%
Kendaraan Aktif	115.360.286	117.607.735	1,9%
Tingkat Kepatuhan	57,34%	57,83%	0,49%

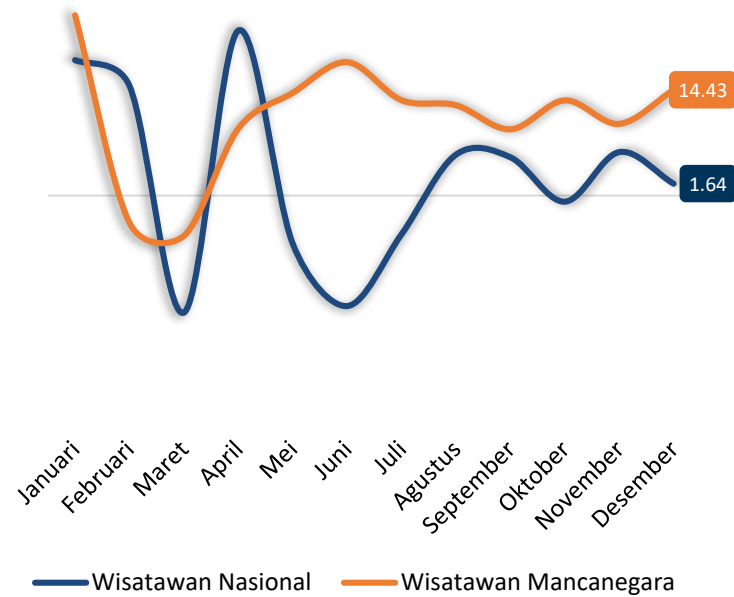
Sumber: Jasa Raharja

Terkait dengan kendaraan bermotor, jumlah kendaraan aktif yang setidaknya membayar pajak sekali dalam lima tahun terakhir meningkat sebesar 1,95%, yaitu menjadi 117,61 juta kendaraan pada tahun 2025. Peningkatan ini juga diikuti oleh kenaikan tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang melakukan daftar ulang. Namun demikian, peningkatan ini tidak sejalan dengan penerimaan PKB yang justru berkontraksi. Kebijakan pemberian insentif PKB yang dilakukan di beberapa wilayah utama disinyalir menjadi faktor yang mempengaruhi penurunan penerimaan tersebut. Kendati demikian, kebijakan tersebut tampaknya berhasil menstimulasi masyarakat untuk mendaftarkan ulang kendaraannya yang sudah lama tidak aktif. Hal tersebut terlihat dari jumlah kendaraan tahun-tahun sebelumnya yang melunasi PKB meningkat hingga 37,10%.

TOURISM & HOSPITALITY TREND



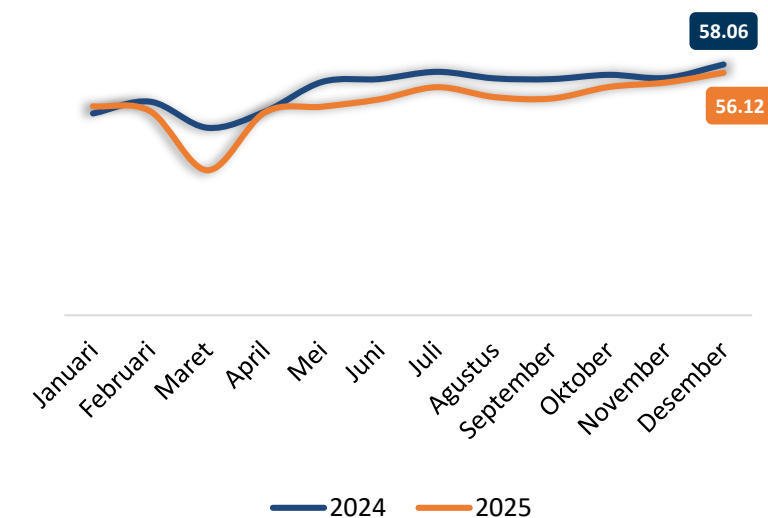
Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)



Sumber: BPS

Pada sektor pariwisata, volume kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik pada Desember 2025 mencatatkan pertumbuhan positif baik secara mtm maupun yoy. Kendati mengalami perlambatan, peningkatan wisatawan domestik bulan Desember sebanyak 823,77 ribu mampu mendorong akumulasi sepanjang 2025 yang meningkat sebesar 2,53% secara ctc. Sebaliknya, pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara justru menunjukkan akselerasi pada bulan Desember dimana jumlah wisatawan mancanegara mencapai 1,40 juta orang. Capaian ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang hanya mencapai 1,19 juta orang atau dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 1,23 juta orang.

Penghunian Hotel Berbintang (%)



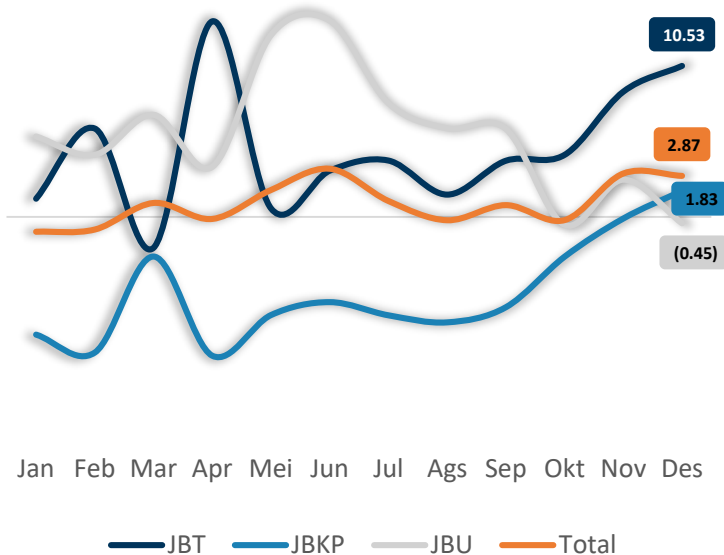
Sumber: BPS

Namun demikian, kenaikan jumlah wisatawan tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat penghunian hotel berbintang. Hal ini yang terjadi pada sepanjang tahun 2025 dimana penghunian hotel berbintang menurun dibanding tahun sebelumnya. Implikasinya adalah turunnya penerimaan PBJT Jasa Perhotelan. Fenomena ini disinyalir muncul akibat pergeseran preferensi wisatawan dalam memilih akomodasi.

ENERGY CONSUMPTION



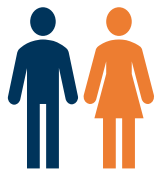
Pertumbuhan Konsumsi Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (% yoy)



Sumber: BPH Migas

Indikator lain yang merepresentasikan basis PDRD adalah pertumbuhan konsumsi energi. Penjualan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) pada Desember 2025 mencapai 6,69 juta kiloliter atau meningkat dari penjualan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,50 juta kiloliter. Pertumbuhan ini didorong oleh semua jenis BBKB kecuali JBU¹⁾ yang berkontraksi tipis sebesar 0,45%. Secara akumulasi, sepanjang tahun 2025 konsumsi BBKB mencapai 76,55 juta kiloliter atau tumbuh 0,98% dibandingkan tahun 2024. Pertumbuhan ini sejalan dengan kenaikan penerimaan PBBKB baik yoy maupun etc.

Pelanggan Listrik



2024 **92,9 Juta**
2025 **96,2 Juta** **3,54%**

Penjualan Listrik



2024 **306,22 Twh**
2025 **317,69 Twh** **3,75%**

Sumber: PLN

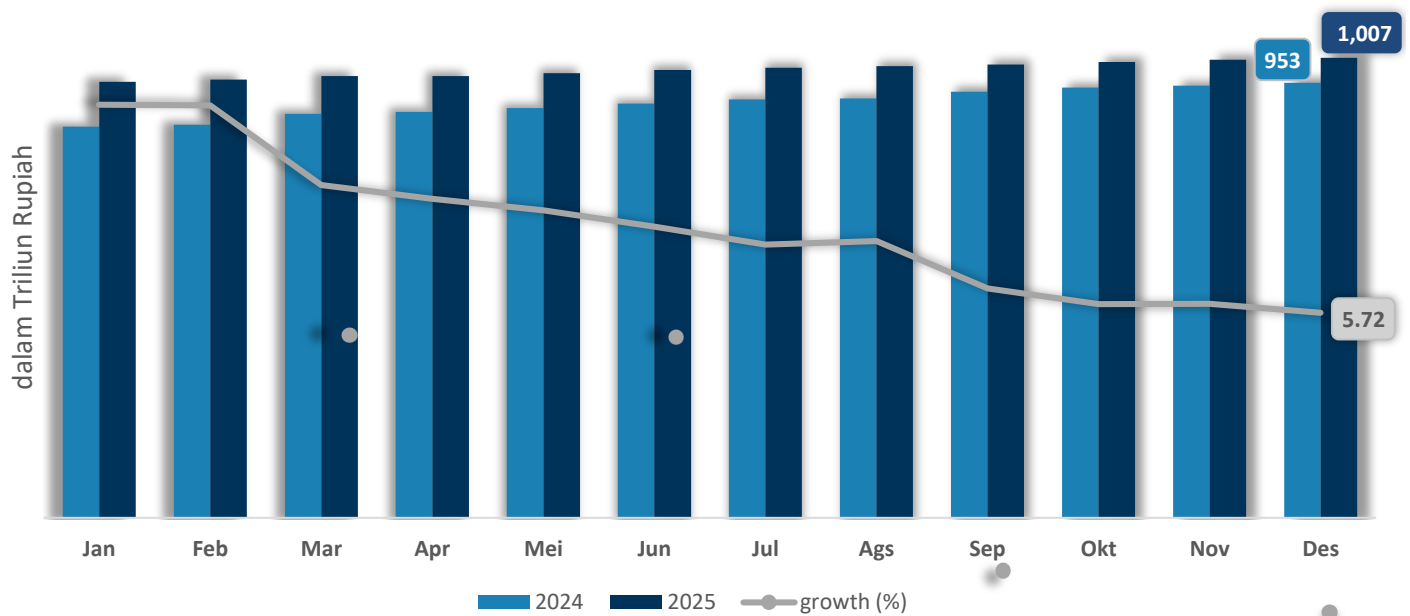
Konsumsi listrik yang merupakan basis penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik mencatatkan pertumbuhan positif sepanjang tahun 2025. Hal ini dipicu oleh penambahan jumlah pelanggan baru di tahun 2025 yang mencapai 3,29 juta pelanggan. Berdasarkan kategori pelanggan, rumah tangga tetap menjadi basis utama konsumsi listrik nasional. Sepanjang tahun 2025, konsumsi listrik kategori ini tumbuh sebesar 3,2% dibandingkan tahun sebelumnya dengan kontribusi sekitar 41,99% dari konsumsi listrik nasional. Sementara itu, pelanggan kategori industri yang menyumbang 29,34% dari konsumsi nasional tumbuh sebesar 2,5% sepanjang 2025. Pertumbuhan tertinggi justru terjadi pada pelanggan kategori bisnis yang meningkat sebesar 5,4%.

¹⁾ Kebijakan jenis-jenis BBM meliputi Jenis BBM Tertentu (JBT) terdiri dari minyak tanah dan solar yang diberikan subsidi dan kompensasi, Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yakni bensin RON 90 Pertalite yang diberikan kompensasi, dan Jenis BBM Umum (JBU) dengan untuk semua jenis BBM tidak diberikan subsidi dan kompensasi (harga *business to business*).



Sektor properti yang merupakan salah satu tulang punggung penerimaan pajak daerah melalui BPHTB dan PBB-P2 menunjukkan tren peningkatan permintaan sepanjang tahun 2025. Meskipun terjadi perlambatan pertumbuhan dibandingkan bulan sebelumnya, pertumbuhan kredit pada bulan Desember tetap menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan mencapai 5,72%. Penyaluran kredit ini seharusnya menjadi sinyal awal menguatnya pendapatan pajak dari sektor properti, mengingat lebih dari 70% kepemilikan properti rumah tangga dilakukan melalui skema kredit perbankan.

Kredit Properti

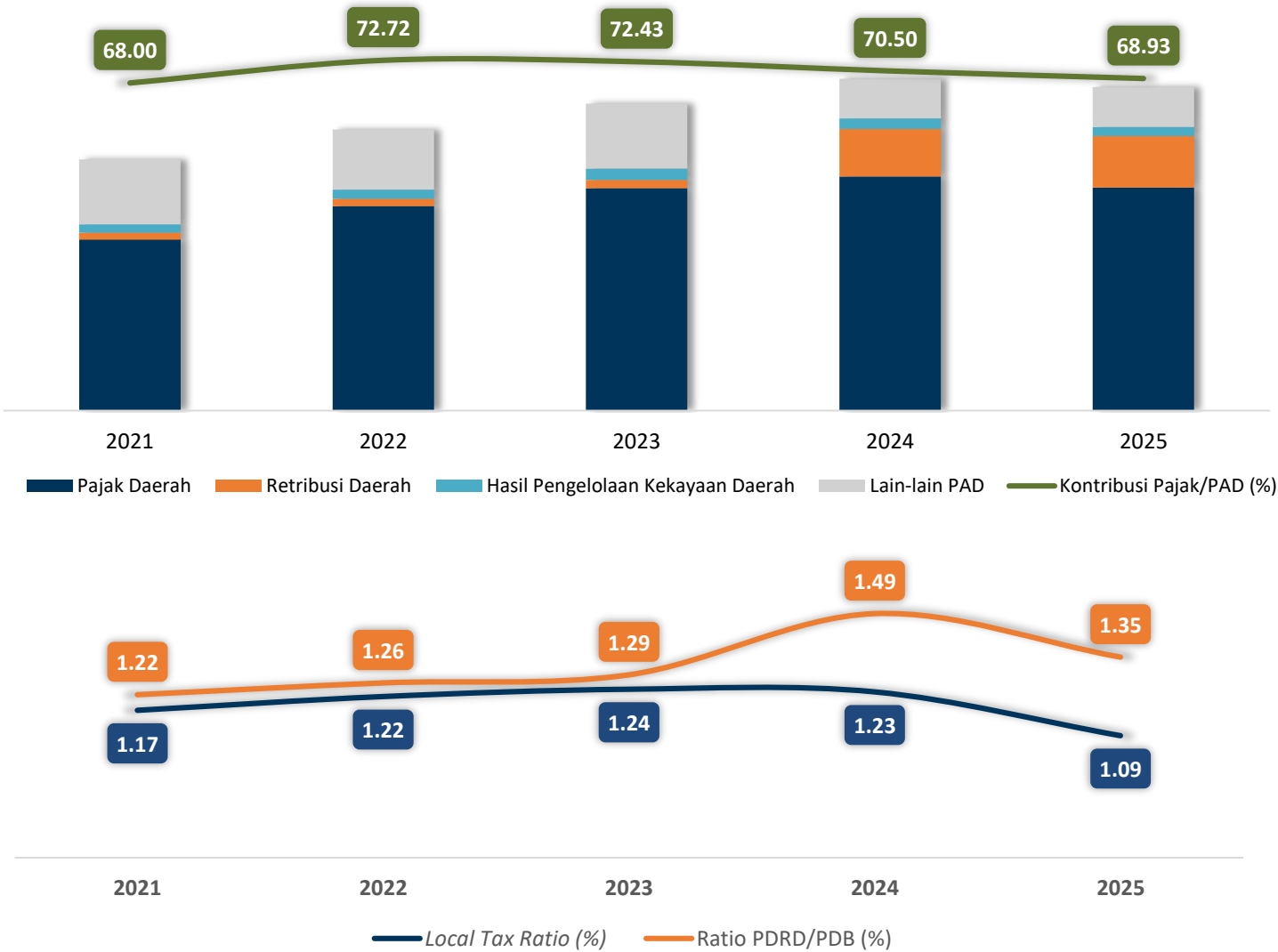


Sumber: SKKI, Bank Indonesia

Namun demikian, indikasi menggeliatnya properti ternyata tidak serta merta mendorong tumbuhnya penerimaan pajak daerah khususnya BPHTB. Hal ini menandai bahwa di tengah tren pertumbuhan basis pajak, dinamika realisasi penerimaan BPHTB saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh tata kelola administrasi pemungutan dan proses transisi kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan pengecualian objek BPHTB atas rumah sederhana bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, kebijakan tersebut memiliki andil terhadap pertumbuhan sektor properti.



Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (dalam triliun rupiah)



Sumber: SIKD dan BPS data per 21 Februari 2026

Sepanjang 2025, perekonomian Indonesia masih melanjutkan tren pertumbuhan positif sebesar 5,11%. Peningkatan aktivitas sektoral memicu pertumbuhan positif pada mayoritas sektor ekonomi yang terkait dengan pajak daerah sepanjang tahun 2025. Namun, kondisi ini tidak sejalan dengan peningkatan efektivitas pemungutan pajak daerah. Rasio pajak daerah (local tax ratio) justru terus menurun sejak tahun 2023, dengan angka penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2025. Kondisi ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu perlambatan laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah dan bahkan pertumbuhan negatif pada tahun 2025 serta lebih tingginya pertumbuhan sektor yang tidak berkontribusi pada pajak daerah dibandingkan sektor yang berkaitan langsung. Secara bersamaan, kontribusi pajak daerah terhadap PAD juga semakin menurun sejak tahun 2022 hingga 2025.

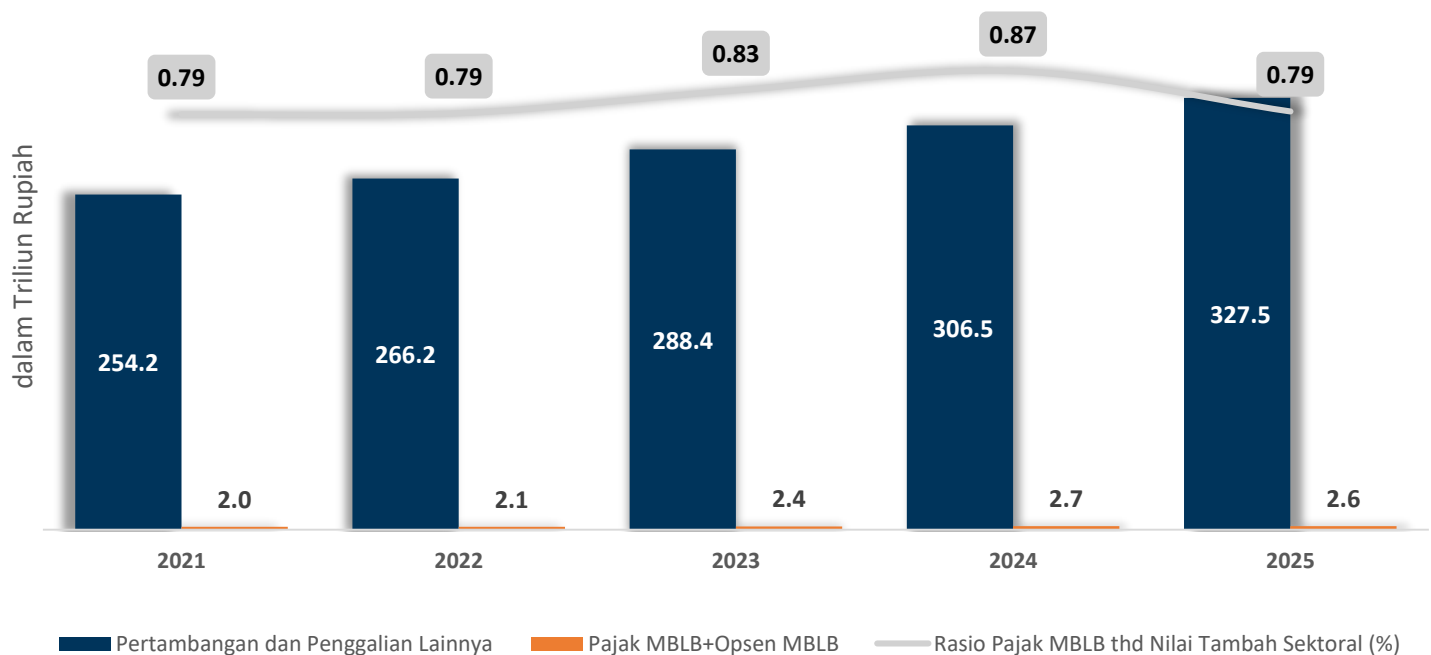
RELATED SECTORS ANALYSIS

MINING SECTOR



Sektor pertambangan dan penggalian lainnya, sebagai basis pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) beserta opsennya, mencatatkan pertumbuhan secara nominal sebesar 6,86% sepanjang tahun 2025. Namun pertumbuhan tersebut ternyata tidak mampu mendorong penerimaan pajak dan opsen MBLB. Penerimaan pajak MBLB beserta opsennya jika dibandingkan dengan nilai tambah sektoralnya hanya mencapai 0,79% pada tahun 2025. Rendahnya rasio saat ini mengindikasikan tingginya tax gap pada jenis pajak tersebut.

Sektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya



Sumber: SIKD dan BPS data per 21 Februari 2026

Tantangan utama dalam mengelola sektor ini mencakup masalah perizinan dan karakteristik pelaku usaha yang mayoritas berskala usaha rumah tangga. Sebagian besar kegiatan perusahaan pertambangan dan penggalian lainnya dilakukan tanpa perizinan. Meskipun secara prinsip perpajakan tetap dapat dipungut apabila syarat objektif dan subjektif terpenuhi, ketiadaan izin menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan pemungutannya. Di sisi lain, dominasi entitas rumah tangga pada lebih dari 90% pelaku usaha di sektor ini memunculkan tantangan tambahan, khususnya terkait kepatuhan terhadap prosedur administratif perpajakan daerah.

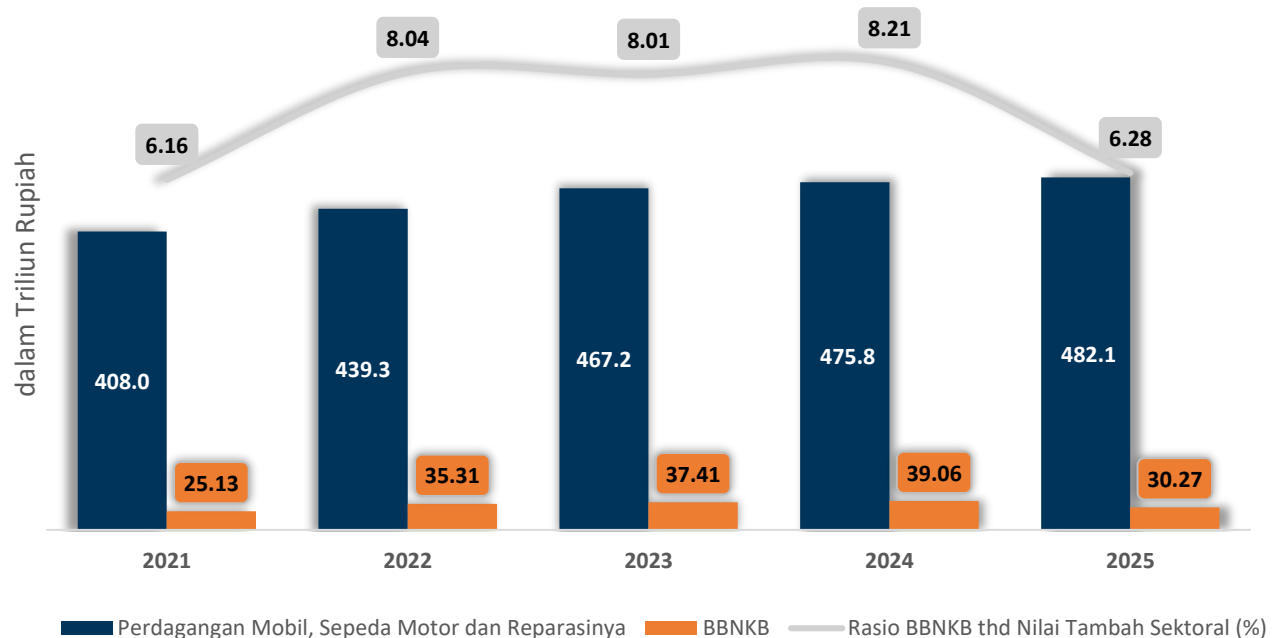
RELATED SECTORS ANALYSIS

WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF AUTOMOBILES AND MOTORCYCLES



Pertumbuhan sektor Perdagangan Mobil, Sepeda Motor, dan Reparasinya belum mampu memicu pertumbuhan penerimaan BBNKB. Kenaikan penjualan kendaraan bermotor roda dua baru ternyata belum mampu mengompensasi kontraksi penjualan kendaraan bermotor roda empat. Tumbuhnya sektor ini merupakan dorongan dari penjualan kendaraan bekas yang tidak berpengaruh terhadap penerimaan BBNKB.

Sektor Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya



Sumber: SIKD dan BPS data per 21 Februari 2026

Pertumbuhan sektor ini juga ditopang oleh peningkatan penjualan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Berdasarkan amanat UU HKPD, KBLBB dan penyerahan kendaraan bermotor bekas dikecualikan dari objek BBNKB mulai tahun 2025 sehingga dampaknya mengurangi basis pajak. Namun demikian, kebijakan ini menumbuhkan optimisme terhadap perluasan ekosistem kendaraan bermotor berbasis listrik yang memiliki efek pengganda terhadap perekonomian. Di sisi lain, tren peningkatan daftar ulang kendaraan bermotor menjadi indikasi awal keberhasilan bauran kebijakan tersebut, khususnya terkait penghapusan BBNKB untuk kendaraan bermotor kedua atau bekas.

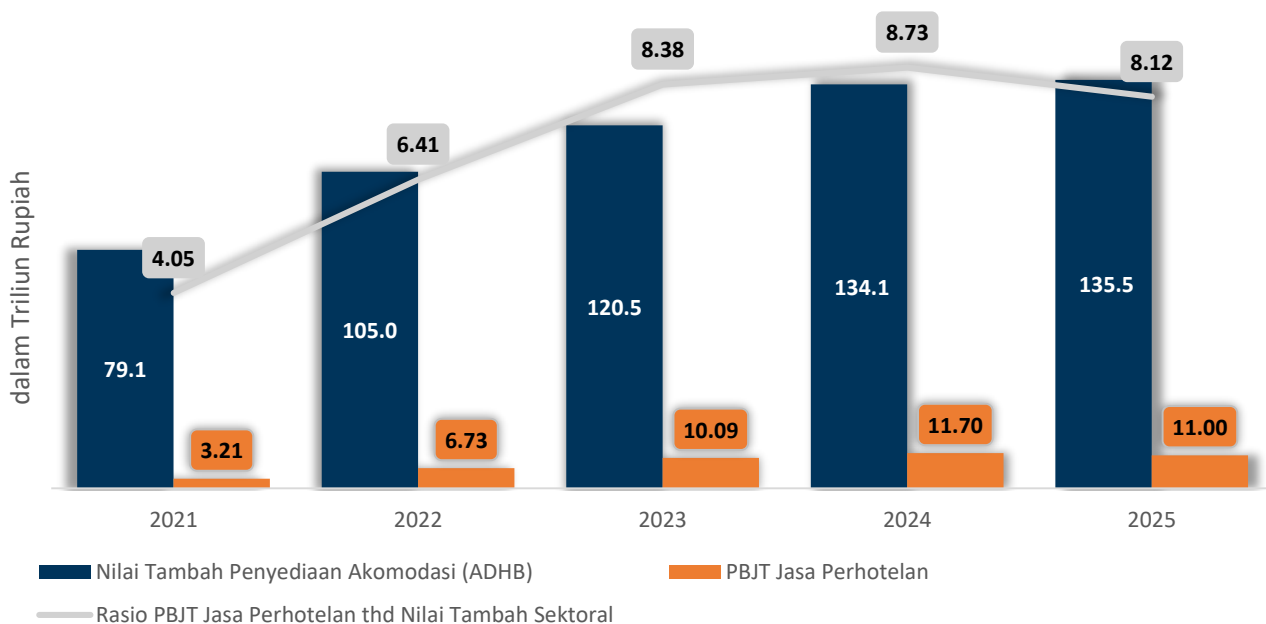
RELATED SECTORS ANALYSIS

ACCOMODATION



Sektor penyediaan akomodasi mengalami kontraksi pertumbuhan sepanjang tahun 2025, meskipun aktivitas ekonomi secara nominal tetap menunjukkan tren positif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa lonjakan nilai transaksi utamanya dipicu oleh kenaikan tarif akomodasi. Secara komparatif, efektivitas pemungutan pajak daerah di sektor ini memang mengungguli sektor lain.

Sektor Akomodasi

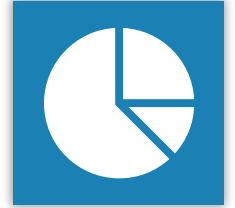


Sumber: SKD dan BPS data per 21 Februari 2026

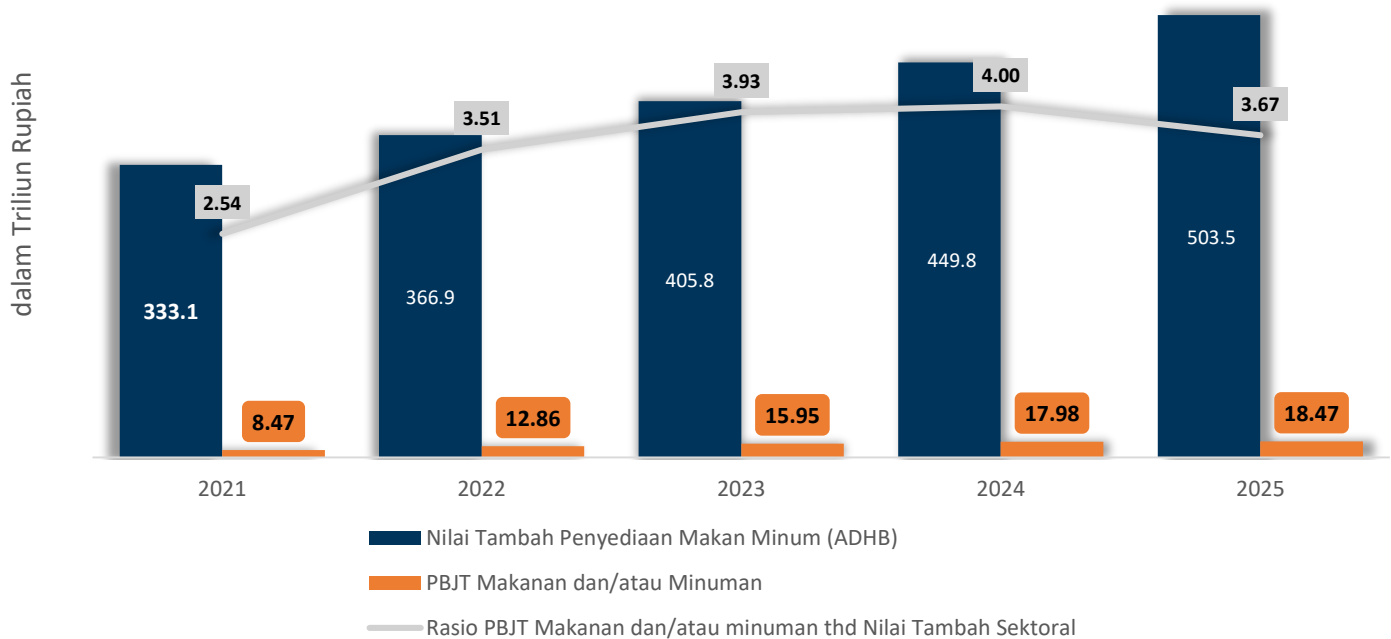
Namun, terjadi anomali berupa penurunan tingkat efektivitas pada tahun 2025. Realisasi penerimaan PBJT Jasa Perhotelan sepanjang tahun 2025 mengalami penurunan di tengah meningkatnya jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara. Anomali ini menegaskan adanya perubahan preferensi wisatawan menuju akomodasi nonbintang atau akomodasi-akomodasi yang berada di luar sistem perpajakan daerah, sehingga implikasi efek pengganda dari belanja akomodasi terhadap penerimaan pajak tidak berdampak signifikan. Kondisi ini seyogyanya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan potensi penerimaan daerah melalui pendataan atau ekstensifikasi atas akomodasi – akomodasi di luar sistem perpajakan.

RELATED SECTORS ANALYSIS

F&B Service

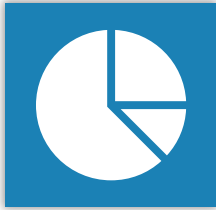


Sektor Penyediaan Makanan dan/atau Minuman

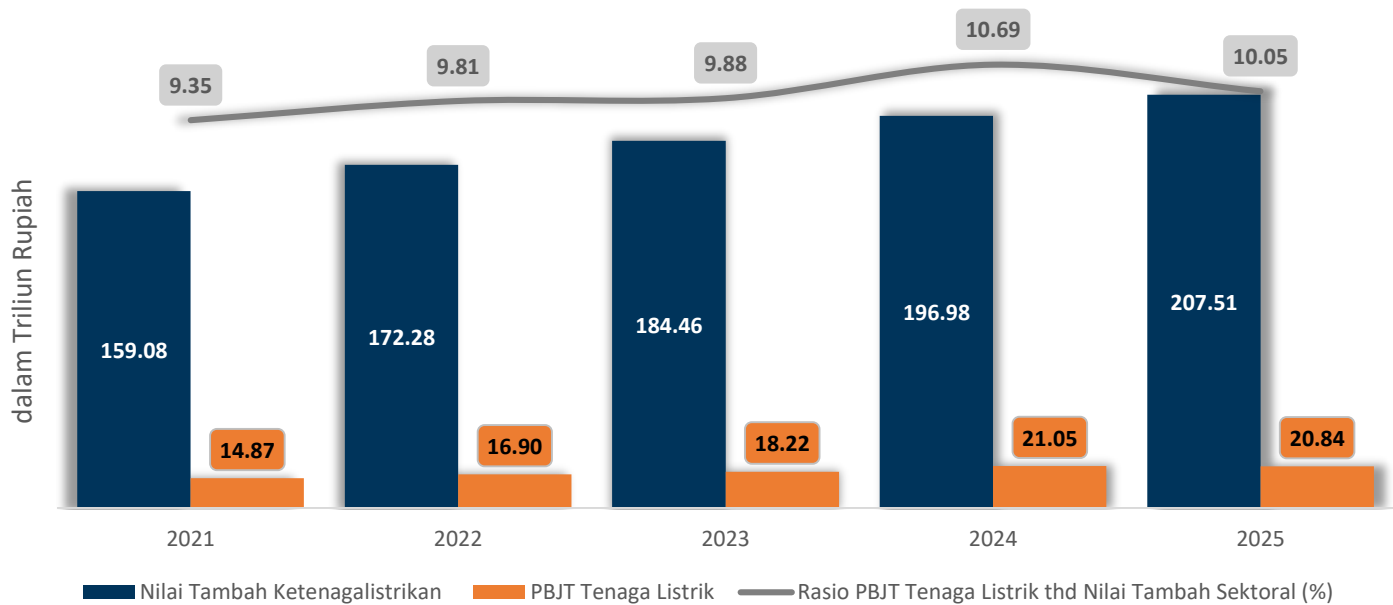


Sumber: SKD dan BPS data per 21 Februari 2026

Sementara itu, aktivitas ekonomi pada sektor penyediaan makanan dan minuman menunjukkan tren peningkatan yang persisten. Tren positif ini sejalan dengan naiknya penerimaan PBJT Makanan dan Minuman, meskipun tingkat efektivitas pemungutannya turun menjadi 3,67%. Hal ini terjadi mengingat tidak seluruh pelaku usaha di sektor tersebut berstatus sebagai wajib pajak, baik karena pengecualian regulasi maupun karakteristik usaha yang belum memenuhi kriteria pemungutan. Tercatat sebesar 46,86% penyedia makanan dan minuman berstatus sebagai pelaku usaha tidak permanen (pedagang dengan tempat tidak tetap), sehingga omzet dari kelompok tersebut sering kali berada di luar basis pengenaan PBJT Makanan Minuman. Selain kendala pendataan tersebut, pergeseran preferensi masyarakat turut menjadi faktor penentu mengapa pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman belum berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.



Sektor Ketenagalistrikan

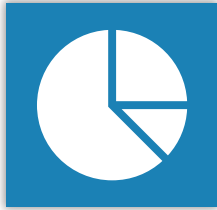


Sumber: SKD dan BPS data per 21 Februari 2026

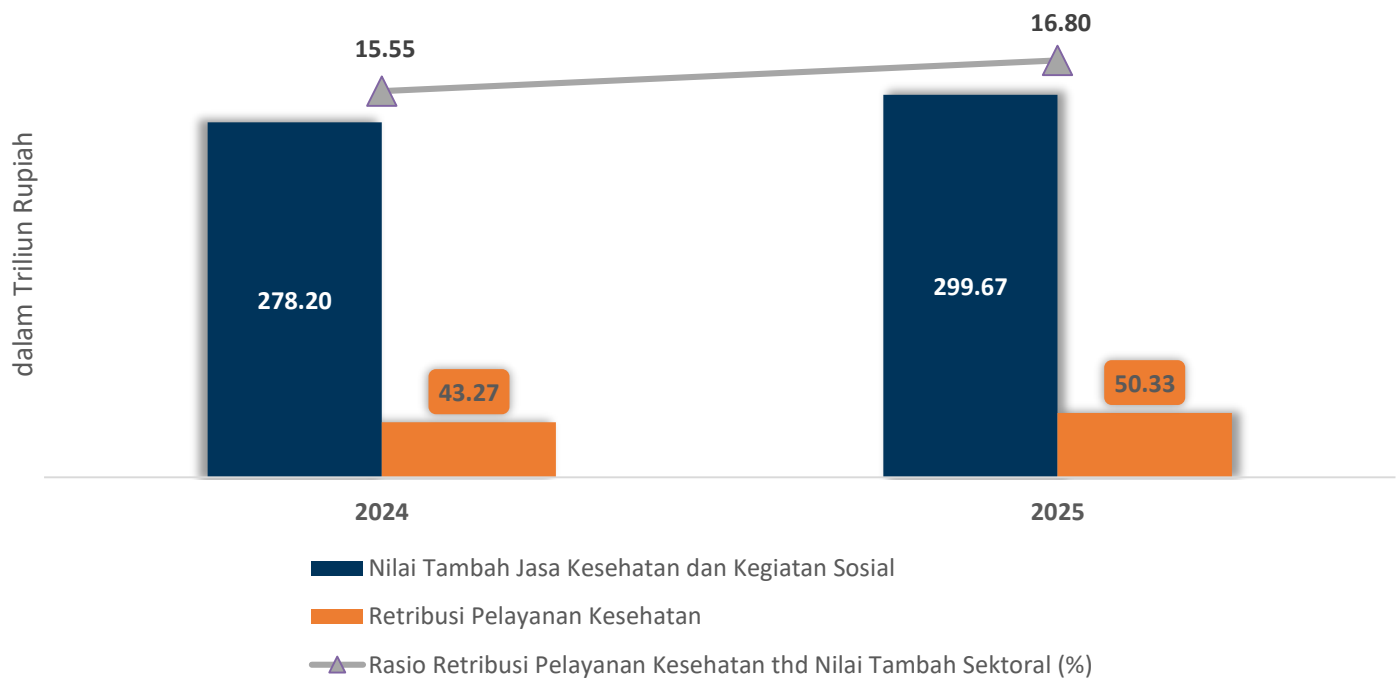
Penjualan listrik menjadi salah satu leading indicator dalam melihat dinamika aktivitas ekonomi. Dalam lima tahun terakhir nilai tambah sektor ketenagalistrikan tumbuh secara stabil mengikuti laju pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, pertumbuhan tersebut belum sejalan dengan peningkatan penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik, khususnya pada tahun 2025. Meskipun konsumsi listrik sebagai basis pajak mengalami peningkatan, tingkat efektivitas pemungutannya justru turun menjadi 10,05%. Hal ini merupakan dampak jangka pendek dari program stimulus pemerintah, salah satunya adalah pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% bagi golongan tertentu pada triwulan I dan II tahun 2025 yang secara langsung mengurangi dasar pengenaan pajaknya. Di sisi lain, stimulus tersebut diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan hasilnya efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara konsisten. Lebih lanjut, potensi penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dapat dioptimalkan melalui ekstensifikasi pajak atas pemanfaatan tenaga listrik yang dihasilkan secara mandiri.

RELATED SECTORS ANALYSIS

HEALTH AND SOCIAL SERVICES



Sektor Jasa Kesehatan dan Jasa Sosial



Sumber: SIKD dan BPS data per 21 Februari 2026

Semakin membaiknya akses terhadap layanan kesehatan dapat dipicu oleh semakin meluasnya cakupan jaminan kesehatan, baik yang diselenggarakan oleh negara maupun swasta. Kemudahan akses tentunya meningkatkan permintaan masyarakat akan layanan kesehatan. Secara ekonomi, terlihat pada tahun 2025 sektor ini tumbuh sebesar 7,72% secara nominal. Pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari kontribusi pemerintah daerah dalam penyediaan layanan kesehatan yang semakin meningkat. Hal tersebut terindikasi dari rasio retribusi pelayanan kesehatan terhadap nilai tambah sektoralnya yang tumbuh dari 15,55% pada tahun 2024 menjadi 16,80% di tahun 2025.

PENANGGUNG JAWAB

Lydia Kurniawati Christyana

TIM PENULIS

1. Guruh Panca Nugraha
2. Catur Panggih Pamungkas
3. Ummi Zulianti
4. Satriyo Ari Raharjo
5. Puput Nurhayati
6. Putra Mulia Rahmat
7. Trianto Budi Utama
8. Muhammad Fawwaz Ananda



PDRD

LENS

Navigasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Dinamika Perekonomian



Diterbitkan Tahun 2026
Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta